



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP. 103 /M.PPN/HK/12/2011

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2012**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254;
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

NASIONAL ...

**NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012.**

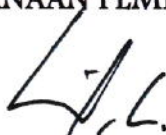
- PERTAMA** : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA** : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) wajib melakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Anggaran menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menatausahakan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Bendahara Pengeluaran Anggaran bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- KETUJUH** : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2011

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

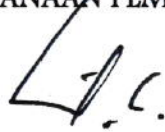
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 103 /M.PPN/HK/12/2011
TANGGAL 29 DESEMBER 2011

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Destri Handayani, ME NIP. 19671116 199703 2 001 Gol. IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2.	Retno Ambarwati, SAP NIP. 19621210 198811 2 001 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
3.	Sri Roshidayati, S.Kom, ME NIP. 19660320 199703 2 001 Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah
4.	Octal Pramudito, SE NIP. 19840420 200803 1 001 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ekonomi
5.	Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc NIP. 19700927 199903 2 005 Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.	Pandu Pradhana, ST NIP. 19841213 2000912 1 005 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sarana dan Prasarana
7.	Khairul Rizal, ST, MPP NIP. 19781031 200501 1 005 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
8.	Yanuar Adiantoro, SE, Ak NIP. 19740120 200003 1 002 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan
9.	Darmawijaya, SE NIP. 19650909 199011 1 001 Gol. IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

10.	Diah Suryaningtyas, SE.Ak NIP. 19811010 200901 2 009 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
11.	Mukijo, SAP NIP. 19720721 199403 1 002 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen I Setmen PPN/Settama Bappenas
12.	Syaiful Afif, SS NIP. 19830911 200912 1 001 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen II Setmen PPN/Settama Bappenas
13.	Henri Yusuf Hasibuan, SE NIP. 19671012 199403 1 003 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III dan Pembiayaan Lainnya Setmen PPN/Settama Bappenas
14.	Drs. Edy Purwanto, MA NIP. 19640315 199011 1 001 Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen IV Setmen PPN/Settama Bappenas (Sumber Daya Manusia Aparatur)
15.	Rusmawel Zuharmirza, SAP NIP. 19680505 199403 1 004 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.	Nursyaf Rullihandia, ST, MM NIP. 19780709 200803 1 001 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
17.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 19591209 198112 1 001 Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan <i>Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)</i>
18.	Aryo Wicaksono, SE NIP. 19820213 200604 1 007 Gol. III/b	Bendahara Pengeluaran Anggaran
19.	Drs. Mursal Yoza NIP. 19571008 198801 1 002 Gol. IV/b	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

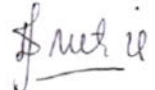




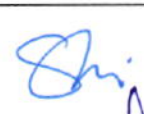
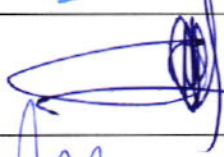
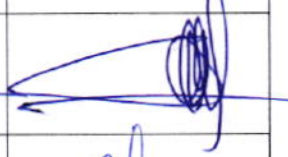


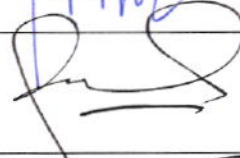



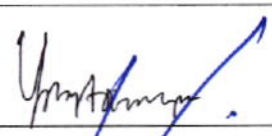
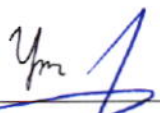


 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


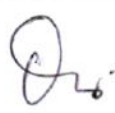

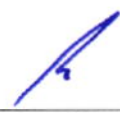


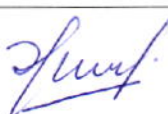

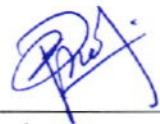



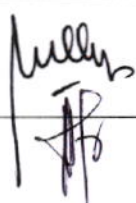



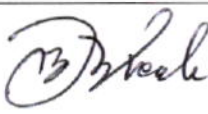





ARMIDA S. ALISJAHBANA

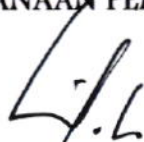
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 103 /M.PPN/HK/12/2011
TANGGAL 29 DESEMBER 2011

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Ir. Destri Handayani, ME NIP. 19671116 199703 2 001 Gol. IV/b		
2.	Retno Ambarwati, SAP NIP. 19621210 198811 2 001 Gol. III/c		
3.	Sri Roshidayati, S.Kom, ME NIP. 19660320 199703 2 001 Gol. IV/a		
4.	Octal Pramudito, SE NIP. 19840420 200803 1 001 Gol. III/a		
5.	Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc NIP. 19700927 199903 2 005 Gol. IV/a		
6.	Pandu Pradhana, ST NIP. 19841213 2000912 1 005 Gol. III/a		
7.	Khairul Rizal, ST, MPP NIP. 19781031 200501 1 005 Gol. III/b		
8.	Yanuar Adiantoro, SE, Ak NIP. 19740120 200003 1 002 Gol. III/c		
9.	Darmawijaya, SE NIP. 19650909 199011 1 001 Gol. IV/b		

10.	Diah Suryaningtyas, SE, Ak NIP. 19811010 200901 2 009 Gol. III/a		
11.	Mukijo, SAP NIP. 19720721 199403 1 002 Gol. III/a		
12.	Syaiful Afif NIP. 19830911 200912 1 001 Gol. III/a		
13.	Henri Yusuf Hasibuan, SE NIP. 19671012 199403 1 003 Gol. III/a		
14.	Drs. Edy Purwanto, MA NIP. 19640315 199011 1 001 Gol. IV/a		
15.	Rusmawel Zuharmirza, SAP NIP. 19680505 199403 1 004 Gol. III/a		
16.	Nursyaf Rullihandia, ST, MM NIP. 19780709 200803 1 001 Gol. III/b		
17.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 19591209 198112 1 001 Gol. IV/a		
18.	Aryo Wicaksono, SE NIP. 19820213 200604 1 007 Gol. III/b		
19.	Drs. Mursal Yoza NIP. 19571008 198801 1 002 Gol. IV/b		

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



ARMIDA S. ALISJAHBANA